

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Air adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Untuk itu keberadaan air sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Air yang bersih akan menghasilkan beberapa manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Diantarnya adalah manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup, dan kesehatan bagi manusia. Memiliki kualitas air yang baik dan bersih tentu menjadi keinginan setiap manusia. Namun dari berbagai daerah masih ada yang mengalami kekurangan pasokan atau aliran air.

Kekurangan pasokan aliran air di suatu daerah disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu keadaan lingkungan yang kurang memungkinkan untuk dijadikan aliran air, serta faktor dari pemerintah setempat yang kurang tanggap terhadap kondisi aliran air di daerahnya. Banyak sedikitnya jumlah air akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan. Akan tetapi ketersediaan air pada dekade ini menjadi sangat terbatas ketika pertumbuhan penduduk semakin bertambah, sementara sumber air malah semakin berkurang.

Salah satu daerah yang sering mengalami permasalahan air adalah wilayah Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Banyak

sekali terjadi kekeringan besar yang melanda di sebagian desa yang termasuk dalam lingkup Kabupaten Tulungagung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung mengungkapkan Desa yang berada pada Kecamatan Tanggunggunung mengalami kekeringan, yakni Desa Kersikan.

Desa Kersikan bertepatan di wilayah pesisir Kabupaten Tulungagung bagian selatan yang notabnya diwilayah pedesaan. Hal ini terjadi tak hanya sekali, hampir pada setiap tahunnya ketika musim kemarau datang dapat dipastikan, Pemerintah harus mengirimkan bantuan air bersih ke desa ini. Ditambah lagi jika kemarau berlangsung sangat lama maka ketersediaan air bersih di desa akan sangat memprihatinkan.

Sehingga sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber daya air bersih dengan memakai sumur, sungai dan pam (saluran air bersih). Keadaan ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang banyak dengan ketersediaan sumber daya air bersih yang sedikit. Semakin hari berlalu semakin tipis persediaan air bersih yang berada disumur itu semakin banyak yang habis dan kering. Kebutuhan air bersih yang begitu penting untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia harus diatur dengan menghemat agar selalu tersedia air bersih di dalam rumahnya.

Pengaturan atas penggunaan sumber air kebutuhan dan ketergantungan atas air bersih (khususnya air) di desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung sangatlah besar

seringkali tidak efektif sehingga menyebabkan pihak rumah tangga penduduk lah yang menjadi korban tidak mendapatkan akses air bersih tersebut, yakni berupa mengeringnya sumur air bersih rumah tangga.

Pengelolaan sumber daya air oleh negara tidak hanya menjadi beban tanggung jawab masyarakat saja namun juga Pemerintah pusat yang juga harus langsung berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya, Pemerintah daerah sebagai regulator tentu memiliki porsi yang cukup besar dalam melakukan pengelolaan sumber daya air.

Pemerintah pusat menetapkan suatu rancangan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air bersih dengan pengaturan yang dibagi berdasarkan wilayah tertentu. Untuk selanjutnya Pemerintah daerah memainkan peranan dan andil penting dalam pengelolaan sumber daya air bersih.

Melihat dengan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih, tentunya kita menengok terhadap Pemerintah bahwa ini menjadi tanggungjawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan menjadikan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 sudah jelas bahwa kewajiban Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, karena air bersih itu adalah sumber atau pokok kehidupan masyarakat. Disamping itu menjadikan UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bersih,

dimana di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa “sumber daya air bersih dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu juga terdapat di pasal 9 ayat 1 mengenai tugas wewenang Pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih. Dengan ini tentunya sudah jelas bahwa kewajiban Pemerintah untuk memakmurkan masyarakat dengan berbagai sistem serta ide-ide untuk menyediakan air bersih dengan cara yang tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kresikan Tanggunggunung Tulungagung).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penghambat sistem penyediaan air bersih bersih kepada masyarakat di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanah cara Pemerintah mengatasi penyaluran air bersih kepada masyarakat di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimanakah pandangan Fiqh siyasah mengenai air bersih Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terhambatnya sistem penyediaan air bersih kepada masyarakat di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan cara Pemerintah mengatasi penyaluran air bersih kepada masyarakat di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan fiqh siyasah mengenai air bersih Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara.
 - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat sebagai dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi Pemerintah Daerah sampai jajaran di bawahnya, supaya dapat memaksimalkan pengelolaan sumber air kepada masyarakat.
 - b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berguna untuk mensukseskan Tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk

pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pihak lainnya

- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai peran pemerintah dalam pengembangan sistem penyediaan air.
- d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang peran pemerintah dalam pengembangan sistem penyediaan air

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul, Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung).

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh instansi atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.¹

Jadi yang dimaksudkan dengan peran dalam penelitian ini adalah

¹ Kamus besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: 2001). Hal. 69.

pemerintah memiliki peran dan tugas untuk mengelola dalam menyediakan air bersih pada suatu daerah atau wilayah.

b. Pemerintah

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara.²

c. Sistem Penyediaan Air

Penyediaan air merupakan program yang dibangun oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa penyediaan air bersih yang akan digunakan oleh masyarakat dalam sehari-hari.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan operasional dari judul “ Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)” Sebagai studi kasus masyarakat Desa Kersikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung adalah tentang peran Pemerintah dalam pengembangan sistem penyediaan air yang telah sesuai dengan peraturan yang ada.

² Ibid, Hal. 859

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing dalam bagian akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan laporan:

BAB I memuat pendahuluan yang berisikan tentang pendahuluan penelitian yang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi, meliputi: latar belakang masalah atau konteks penelitian, fokus atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II memuat gambaran umum kajian teori tentang peran Pemerintah dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

BAB III didalamnya memuat penegasan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah paparan data dan analisis terhadap Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air bersih di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung serta temuan penelitian.

BAB V pada bab ini berisi tentang pembahasan tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air bersih di Desa

Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sesuai dengan fokus penelitian.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian Akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.